

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Barda Nawawi Arief, Pelengkap Bahan Kuliah, Cetakan I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Badudu, Zein, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Indonesia, 1985.

Mansyur Amien, Rencana Kerja, Lembaga Administrasi Negara, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Balai Latihan Industri, Surabaya, 1996.

Mulyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.

Ronny Hamitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Penerbit Balai Lektor Indonesia, Jakarta.

Soesilo Yuwono, SH., Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedurnya.

Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan II, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1990.

Taufik Hidayat, SH. Hubungan Kerja Antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Republik Indonesia.

Taufik Hidayat, SH. Penataran Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Republik Indonesia.

Utrech, Hukum Pidana I, Penerbit Tirta Mas, Surabaya, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit PT. Eresco, Jakarta-Bandung, Desember 1967.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, Mei, 1987.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Buku Laporan Pertemuan Teknis Kemetrologian Tahun 1996 / 1997, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Metrologi, Bandung, 1996.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Metrologi Legal di Indonesia, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Metrologi, Bandung, 1996.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Workshop Metrologi, "Metrologi Menjamin Tertib Ukur Guna Melindungi Produsen / Konsumen, Pada Gilirannya Memperkuat Daya Saing Produk Indonesia di Pasar Global", Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Metrologi, Bandung, 1996.

Departemen Pertahanan dan Keamanan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Pokok-pokok Petunjuk Proses Penyidikan Tindak Pidana, Cipayung, 1982.

Departemen Pertahanan dan Keamanan, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Memori Serah Terima Jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan, Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, 1996.



B. Peraturan Perundang-undangan

Andi Hamzah, Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Rineka Cipta, 1992.

R. Atang Ranoemihardja, Hukum Acara Pidana, Penerbit Tarsito, Bandung, 1974.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M - 04 - PW . 07 . 03 Tahun 1984, tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penjelasan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 2 / 81 tentang Metrologi Legal.

Tap MPR Nomor II / MPR / 1993 tentang GBHN Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Metrologi, Proyek Kemetrolgian, 1982 / 1983.

